

ISU Sepekan

BIDANG HUBUNGAN INTERNASIONAL

Minggu ke-5 April 2021 (23 April s.d. 29 April 2021)



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

KONSENSUS ASEAN DALAM TARUHAN

Humphrey Wangke
Peneliti Bidang Hubungan Internasional
Humphrey.wangke@dpr.go.id

ISU ATAU PERMASALAHAN

KTT (ASEAN Leaders Meeting) diadakan pada tanggal 24 April 2021 di Sekretariat ASEAN di Jakarta. KTT merupakan peran konstruktif ASEAN dalam memfasilitasi solusi damai untuk kepentingan rakyat Myanmar. Pertemuan itu merupakan upaya terkoordinasi ASEAN yang pertama untuk meredakan krisis di Myanmar. Semangat inklusif ASEAN ditunjukkan dengan diundangnya Panglima Junta Militer Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing.

5 konsensus untuk mengakhiri krisis gejolak di Myanmar dihasilkan dari pertemuan itu, yaitu:

- Pertama, kekerasan harus segera dihentikan di Myanmar dan semua pihak harus menahan diri sepenuhnya.
- Kedua, dialog konstruktif diantara semua pihak terkait mulai mencari solusi damai untuk kepentingan rakyat.
- Ketiga, utusan khusus Ketua ASEAN akan memfasilitasi mediasi dari proses dialog, dengan bantuan Sekretaris Jenderal ASEAN.
- Keempat, ASEAN akan memberikan bantuan kemanusiaan melalui AHA Centre.
- Kelima, utusan khusus dan delegasi mengunjungi Myanmar untuk bertemu dengan semua pihak.

Banyak pihak meragukan capaian ASEAN itu akan terimplementasi efektif. Pernyataan yang dikeluarkan junta mengatakan mereka akan mengindahkan hasil konsensus ASEAN jika hal itu sesuai dengan Piagam ASEAN, ASEAN Way, dan Semangat ASEAN serta kepentingan Myanmar. Sementara Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) mengatakan, mereka hanya mau mengimplementasikan konsensus ASEAN jika semua tahanan politik dibebaskan. Adanya syarat dari kedua belah pihak menunjukkan bahwa tidak ada jaminan lima poin konsensus akan dijalankan oleh kedua belah kubu. Apa yang harus dilakukan ASEAN selanjutnya?

Pasca pertemuan para pemimpin ASEAN yang berlangsung tanggal 24 April 2021, konflik militer terjadi antara militer Myanmar dengan kelompok pemberontak minoritas Karen. Namun perlawanan terhadap junta tidak hanya dilakukan oleh kelompok etnis, tetapi juga oleh para pemuda Myanmar yang diketahui sedang melatih diri ditengah hutan untuk menjadi kekuatan tempur baru. Di Myanmar juga telah terbentuk pemerintahan tandingan (NUG) yang dibentuk oleh politisi dan aktivis demokrasi Myanmar. Ada 4 tuntutan NUG yaitu dikembalikannya masa pemerintahan para pemimpin dan anggota parlemen yang dipilih secara demokratis, bebaskan Aung San Suu Kyi, akhiri kekerasan terhadap warga sipil dan tentara disingkirkan dari jalanan serta pembebasan tahanan politik.

Isu Myanmar adalah isu yang sensitif karena persoalan yang dihadapi adalah isu dalam negeri, namun bila kondisi internal itu terus mengganggu kerjasama ASEAN maka proses pendekatan dan diplomasi tidak dapat lagi dilakukan secara senyap. Indonesia harus segera mendorong negara-negara ASEAN untuk menyelesaikan konflik internal Myanmar secepatnya dengan mengembalikan pemerintahan demokratis di Myanmar. Langkah seperti ini sekaligus memberi pelajaran kepada militer Myanmar (Tatmadaw) bahwa kudeta bukan solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah dalam negeri.

SUMBER

Myanmar Junta Wants 'Stability' Before Heeding Plea on Violence, The Jakarta Post, 28 April 2020, hal. 1.

Myanmar's Shadow Government Stands Ready to Engage ASEAN, The Jakarta Post, 29 April 2021, hal. 2.

Ratusan Pemuda Latihan Militer, Kompas 28 April 2021, hal. 4.

Kedua Belah Pihak Tetapkan Syarat untuk Laksanakan Konsensus ASEAN, Kompas, 29 April 2021, hal. 4.

Junta Pertimbangkan Saran ASEAN, Media Indonesia 28 April 2021, hal. 14.

Tidak Ada Dialog Tanpa Pembebasan Tahanan, Media Indonesia, 29 April 2021, hal. 14.